

WORKSHOP DAN SEMINAR HAM UNTUK TENAGA PENDIDIK AKPOL  
Negara, Radikalisme dan Tantangan Kepolisian untuk  
Perlindungan Kebebasan Agama dan Berkeyakinan Di Indonesia  
*Hotel Santika Premiere Semarang, 15 – 17 April 2015*

---

# MAKALAH



## MENCARI AKAR IDEOLOGI RADIKALISME DAN TUGAS KEPOLISIAN

Oleh:  
*Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum*



# **MENCARI AKAR IDEOLOGI RADIKALISME DAN TUGAS KEPOLISIAN**

M.Busyro Muqoddas

## **Pengantar**

Paper ini tidak hendak membicarakan tema diatas dari aspek teori ideologi yang memerlukan waktu tersendiri. Pendekatan penulis diletakkan dalam perspektif fenomenologis sosiologis sebatas pengalaman di era orde baru dan sesudahnya. Kajian dengan perspektif ini dapat memperoleh sumber-sumber data sosial yang dengan kejegan datanya dapat ditarik kesimpulan untuk kajian yang bersifat analitis tentang problematik ideologi radikalisme yang tidak ada tanda-tanda memudar. Hasil kajian lebih lanjut menjadi berharga untuk telaah evaluatif tentang akar ideologi radikalisme, faktor pemicu, modus pelaku dan sekaligus paradigma pemikiran solutifnya.

## **I. Beberapa Kasus Radikalisme Era Rezim Orba**

Era Orba ditandai dengan sistem kekuasaan otoriter dengan wataknya yang sentralistik, birokrasi pengawasan super ketat dan represif terhadap semua lembaga negara dan elemen masyarakat sipil sebagai pilar utama demokrasi. Kekuasaan yang tidak terkontrol sengaja di desain untuk menjadikan pemerintah orba menjadi sensitif dan anti kontrol.

Rakyat diposisikan dalam pengkotakan politik yang sepenuhnya dikontrol oleh presiden. Papol utama Golkar menjadi pilar utama kekuasaan. Partai lain, PPP dan PDI berada dalam posisi dilemahkan dan diintervensi. Sejumlah rekayasa politik dirancang oleh operasi intelijen yang *smooth*, *silent* tetapi efektif. Beberapa sejumlah rekayasa intelijen itu diantaranya:

1. GPK diberbagai tempat dengan isu NII. Kasus kantor Polsek Cicendo, Imron, pengeboman BCA, gereja di berbagai kota, aktivis muslim kampus dengan isu asas Islam versus asas tunggal Pancasila, pengeboman candi Borobudur, rencana pembunuhan Presiden Suharto

dengan roket, pengeboman gereja di berbagai daerah dalam waktu yang relatif berdekatan, tragedi pembantaian Tanjungpriok, hingga kasus rekayasa sekaligus kriminalisasi umat Islam melalui “jebakan politik sinetron Komando Jihad”, versi Letjen Ali Moertopo dengan pelaku utama eks DI TII Danu Muhammad Hasan, Hispran, dan sejumlah operator lapangan di Sumatera, Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan Sulawesi. Inilah “prestasi sempurna” rezim orba dalam merekayasa elemen masyarakat.

Tujuannya: menciptakan ketakutan sistemik dan masif, dan berhasil dalam kurun waktu 30 tahun. Benefit politik yang diunduh Soeharto dan budak-budak politiknya yang tuna kemanusiaan adalah “pengawetan kekuasaan korup”. Yaitu, korupsi perekonomian negara, HAM, agama dan Pancasila, melalui P4. Catatan: Cara rezim orba di atas mengonfirmasi “ideologi kekerasan ala Fasisme”.

Ciri-cirinya: Loyalitas buta/ taklid politik kepada pimpinan, anti dialog dan kritik, membungkam kekuatan demokrasi, semangat pertempuran terhadap lawan/represif, kasar, kejam, sadistik dan tidak ada sisa wajah kemanusiaan. Radikalisme erba orba adalah buah politik *by design* penguasa yang anti demokrasi dan HAM.

2. Rekayasa Politik Legislasi, dengan memandulkan MPR/DPR sebagai lembaga demokrasi lipstik. Produk hukum Senayan direkayasa untuk pengamanan dan pengawetan kekuasaan dan berhasil dalam kurun waktu tiga dekade. Kekuatan kritis beberapa anggota DPR dengan mudah diatasi dengan berbagai cara halus dan kasar.
3. Penguasaan sumber daya alami di daerah dengan sistem sentralistik berbuah pada gerakan perlawanan sebagai reaksi atas ketidak-adilan sosial ekonomi yang menyebabkan disintegritasi sosial.

## **II. Kasus Paska Rezim Orba**

Era ini ditandai dengan uforia politik yang *over-excessive*, tanpa modalitas ideologi kenegaraan yang *clear* secara akademis. UUD utamanya bagian terpenting “Mukadimah”, tidak pernah menjadi realisasi secara sistemik terbuka dan partisipasi publik untuk dijabarkan ke dalam politik legislasi nasional dan daerah.

Parpol mengalami kefakiran dan kevakuman ideologi otentik ini. Yang menonjol adalah sub-sub ideologi yang tidak jelas konsepnya. Yang menonjol justru primordialisme yang memproduksi eksklusivisme yang anti kejujuran dan anti keterbukaan.

Panggung politik lebih diwarnai kaplingisasi SDA dan Sumber daya perekonomian negara. Ini tidak sehat secara ideologi kebangsaan.

Efek destruktifnya adalah lanjutan kaplingisasi dan dalam ujungnya ketidakadilan sosial sumber daya ekonomi. Sejumlah konflik horizontal adalah produk dari situasi ini. Misalnya, di Mesuji, NTB, Kalimantan, Papua dan di berbagai daerah lain.

Ketidakjelasan wajah ideologi justru menjadi pemantik gerakan radikal yang bermotif ekonomi, tetapi berdampak politik.

## **III. Dampak Eksklusivisme Pemahaman Agama**

Fakta pemahaman agama yang doktrin asalnya bersifat rahmatan lil’alamin dan cinta kasih, mengalami interaksi eksternal dengan sejumlah faktor dalam dan luar negeri. Kurangnya dialog secara terbuka menjadi salah satu penyebab.

Situasi ini berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok *destroyer* dengan model-modal adu domba inter dan antar umat beragama. Penulis faham tentang aktor-aktor aparat dan aktivis ini. Agama dijadikan alat untuk kepentingan pragmatis dengan tujuan ekonomis dan kekuasaan.

Beberapa pusat keagamaan yang seharusnya sudah dilakukan penindakan secara sistemik dan cerdas justru mengalami pembiaran. Tentang ini, maka elemen pemerintah dan elemen masyarakat sipil memiliki tanggungjawab yang sama.

#### **IV. Tugas Kepolisian**

1. Reposisi dan afirmasi polisi berbasis masyarakat
2. Reposisi AKPOL dan Lemdik dalam konteks pembentukan masyarakat madani berbasis nasionalisme otentik UUD 1945 dan budaya masyarakat yang berwatak guyub, gotong royong dan solidaritas sosial yang tinggi.
3. Merajut kohesi sosial dengan semua kekuatan masyarakat madani dan mempertegas dari godaan dan hasutan politik kekuasaan yang saat ini lebih beraroma parpol.